SKRIPSI

UPAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP) DALAM MENANGANI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI TEPIAN SUNGAI KAPUAS KELURAHAN BANSIR LAUT KOTA PONTIANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh

Syifa Salsabila
E1031221046

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP) DALAM MENANGANI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI TEPIAN SUNGAI KAPUAS KELURAHAN BANSIR LAUT KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Syifa Salsabila

NIM. E1031221046

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Aliyah Nuraini Hanum, S.Sos, M.Si Tanggal: 2 Juli 2026
NIP. 198104232005012002

Dosen Pembimbing Pendamping

Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP, M.Sc Tanggan: 30/06 2026
NIP. 199211132022030112

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP) DALAM MENANGANI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI TEPIAN SUNGAI KAPUAS KELURAHAN BANSIR LAUT KOTA PONTIANAK

Oleh:
Syifa Salsabila
NIM. E1031221046

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Waktu : 09.00
Tempat : Ruang 3

Tim Penguji

Ketua

Aliyah Nuraini Hanum, S.Sos, M.Si
NIP. 198104232005012002

Sekretaris

Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP, M.Sc
NIP. 199211132022030112

Penguji Utama

Hairil Anwar, S.E., M.Si.
NIP. 196905142007011004

Penguji Pendamping

Nawang Aviani, S.S.T, M.A.P
NIP. 199207252022032016

Disahkan Oleh
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dalam penanganan kawasan kumuh di Tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan informan dari instansi terkait, antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Lurah Bansir Laut, serta informan dari unsur masyarakat. Analisis data menggunakan teori fungsi pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang mencakup fungsi pelayanan *(service)*, pemberdayaan *(empowerment)*, dan pembangunan *(development)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Bansir Laut belum menyeluruh. Fungsi pelayanan telah berjalan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), meskipun masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan dan kualitas layanan. Fungsi pemberdayaan belum optimal karena partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan seperti Musrenbang masih terbatas. Adapun fungsi pembangunan menunjukkan capaian melalui penurunan luas delineasi kawasan kumuh, namun terkendala pada ketersediaan anggaran dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan alokasi dana stimulan, serta pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif guna mewujudkan penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan di Kelurahan Bansir Laut.

Kata Kunci: kawasan kumuh, fungsi pemerintah, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the efforts of the Department of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) in addressing slum areas along the Kapuas River waterfront in Bansir Laut Village, Pontianak City. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with informants from relevant government institutions, including the Department of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP), the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of Pontianak City, the Head of Bansir Laut Village, as well as members of the local community. Data were analyzed using Ryaas Rasyid's theory of government functions, which encompasses the functions of service, empowerment, and development. The findings indicate that the implementation of government functions in addressing slum areas in Bansir Laut Village has not yet been comprehensive. The service function has been implemented through the provision of basic infrastructure and the rehabilitation of uninhabitable houses (Rumah Tidak Layak Huni); however, the coverage and quality of these services remain limited. The empowerment function has not been fully optimized, as community participation in planning processes, such as the participatory development planning forum (Musrenbang), remains relatively low. Meanwhile, the development function has demonstrated progress through a reduction in the delineated area classified as slums, although its implementation has been constrained by limited budget availability and insufficient inter-agency coordination. This study concludes that stronger coordination among government agencies, increased allocation of financial support, and more intensive community empowerment initiatives are essential to achieving sustainable slum area management in Bansir Laut Village.

Keywords: *Slum Areas; Government Functions; Public Service; Development; Community Empowerment.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *"Upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh di Tepian Sungai Kapuas Kelurahan Bansir Laut Kota Pontianak".* Penelitian ini dilatarbelakang oleh pentingnya penanganan kawasan permukiman kumuh demi memberikan lingkungan yang nyaman dan layak bagi masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak melalui instansi-instansi terkait khususnya DPRKP Kota Pontianak telah berupaya menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di kawasan kumuh Kelurahan Bansir Laut. Upaya tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah kekumuhan di Kelurahan Bansir Laut.

DPRKP Kota Pontianak telah melakukan beberapa program di kawasan Bansir Laut seperti revitalisasi kawasan Kampung Caping, perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan jalan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya anggaran dalam program penataan kawasan kumuh tersebut, sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan tidak hanya bergantung pada program pemerintah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak dalam menangani kawasan permukiman di Tepian Sungai Kapuas Kelurahan Bansir Laut Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak dalam

menangani kawasan permukiman kumuh berdasarkan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan dan literatur dalam bidang pembangunan perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh dan peran organisasi perangkat daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan permukiman. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam menilai efektivitas program dan strategi yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Pejabat DPRKP Kota Pontianak (bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lurah Bansir Laut dan masyarakat. Analisi data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menguji keabsaha data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRKP Kota Pontianak dan instansi terkait telah berupaya untuk menangani kawasan kumuh di Kelurahan Bansir Laut. DPRKP Kota Pontianak telah melaksanakan fungsi pelayanan melalui berbagai program seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penataan kawasan, penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), bantuan material bencana, serta

peningkatan sarana dan prasarana lingkungan. DPRKP Kota Pontianak dan instansi terkait telah melaksanakan pembangunan fisik berupa revitalisasi kawasan Kampung Caping, perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan jalan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Fungsi pemberdayaan telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi program, rembuk warga, dan Musrenbang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, DPRKP Kota Pontianak telah berupaya untuk menangani kawasan kumuh dan sudah berjalan dengan baik. Walaupun masih ada beberapa program yang masih belum terlaksana dan masih terdapat kendala, DPRKP Kota Pontianak tetap berupaya memberikan pelayanan dengan maksimal dan berupaya untuk lebih baik kedepannya.

DPRKP Kota Pontianak diharapkan meningkatkan program penanganan kawasan kumuh secara lebih merata, khususnya pada wilayah yang masih memiliki terindikasi kumuh. Kelurahan Bansir Laut diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan lahan sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat juga harus lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh serta mematuhi aturan terkait pemanfaatan lahan dan sempadan sungai.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: SYIFA SALSABILA
Nomor Mahasiswa	: E1031221046
Program Studi	: ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftaf pustaka.

Pontianak, 14 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



(Syifa Salsabila)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Amsal 23:18

"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang"

Mazmur 126:5

"Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai"

"So nevermind the darkness, we still can find a way"

(Guns N' Roses)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, penyertaan, dan berkat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Abel dan Ibu Salina, serta adik-adik tersayang Kartajaya Pasha dan Maylafaisha. Yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan saya.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang tidak akan terlupakan selama menempuh pendidikan.

Terakhir, untuk diri saya sendiri. karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan, kerja keras, dan ketekunan dalam menyelesaikan pendidikan serta menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuni-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh di tepian Sungai Kapuas Kelurahan Bansir Laut Kota Pontianak" dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena hasil yang ingin dicapai merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

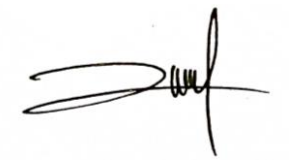
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Aliyah Nur'aini Hanum, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran berharga dalam penyusunan skripsi ini.
3. Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP, M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberkan petunjuk, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

4. Hairil Anwar, SE, M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Nawang Aviani, S.S.T., M.A.P selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses akademik penulis.
8. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
9. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
10. Dinas Perumumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak yang telah menerima penulis dengan baik serta membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian.
11. Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum (PUPR) Kota Pontianak yang telah memberikan arahan, data dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
12. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap langkah penulis.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis dapat mendapat balasan Dari Tuhan Yang Maha Esa, dan harapan penulis hasil karya yang penulis tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun acuan bagi para pembaca untuk menulis serta juga memberikan manfaat yang cukup bagi kita semua.

Pontianak, 14 Juni 2026



Syifa Salsabila
E1031221046

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 12
1.3 Fokus Penelitian 12
1.4 Rumusan Masalah 12
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 13
BAB II TINJAUAN TEORI **15**
2.1 Teori 15
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 23
2.3 Alur Pikir Penelitian 26
2.4 Pertanyaan Penelitian 29
BAB III METODE PENELITIAN **30**
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Langkah-langkah Penelitian 31
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 32
3.3.1 Lokasi Penelitian 32
3.3.2 Waktu Penelitian 33
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 34
3.4.1 Subjek Penelitian 34
3.4.2 Objek Penelitian 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 38
3.7 Analisis Data 40
3.7.1 Teknik Analisis Data 40

3.7.2 Keabsahan Data 41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 44
4.1 Gambaran Umum Kota Pontianak 44
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Bansir Laut 46
4.3 Gambaran Umum DPRKP Kota Pontianak 48
4.3.1 Struktur Organisasi DPRKP Kota Pontianak 48
4.3.2 Visi dan Misi DPRKP Kota Pontianak 49
4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi DPRKP Kota Pontianak 51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 59
5.1 Hasil Penelitian 59
5.1.1 Pelayanan *(service)* 60
5.1.2 Pembangunan *(development)* 65
5.1. Pemberdayaan *(empowerment)* 71
5.2 Hasil Pembahasan 75
5.2.1 Pelayanan *(Service)* 76
5.2.2 Pembangunan *(Development)* 80
5.2.3 Pemberdayaan *(Empowement)* 83
BAB VI PENUTUP 86
6.1 Simpulan 86
6.2 Saran 87
6.3 Keterbatasan Penelitian 89
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

Gambar 1.1 Tepian Sungai Kapuas 3
Gambar 1.2 Kelurahan Bensir Laut.....3
Gambar 1.3 Kondisi Bangunan……6
Gambar 1.4 Kondisi Jalan……6
Gambar 1.5 Kepadatan Bangunan……6
Gambar 1.6 Kondisi Lingkungan 6
Gambar 4.1 Peta Kota Pontianak 44
Gambar 4.2 Kelurahan Bansir Laut.....47
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DPRKP 49
Gambar 5.1 Kondisi Lingkungan 64
Gambar 5.2 Dokumentasi Peningkatan Kulaitas Kawasan Di Bansir Laut 66
Gambar 5.3 Dokumentasi Rembuk Warga 72

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kumuh 3
Tabel 1.2 Permasalahan Wilayah Kumuh 4
Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan DPRKP 10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 23
Tabel 2.2 Waktu Penelitian 33
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pontianak 45
Tabel 4.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pontianak 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

Lampiran 1 Surat Tugas Penelitian 94
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 95
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 98
Lampiran 4 Riwayat Hidup Penulis 99

BAB I
PENDAHULUAN

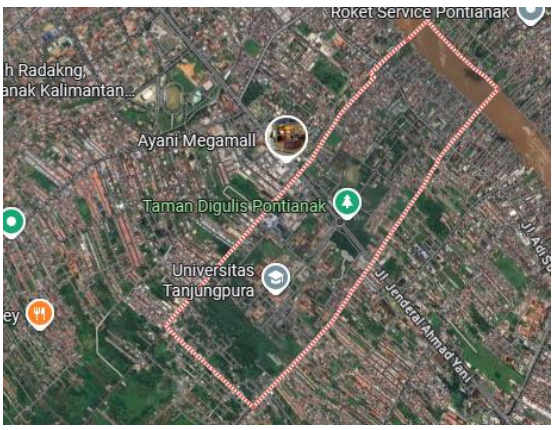
1.1 Latar Belakang

Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota Khatulistiwa merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan daerah sentral ekonomi bagi Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, Kota Pontianak menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, pertumbuhan kota yang pesat ini tidak selalu diimbangi dengan kualitas infrastruktur yang memadai, ada wilayah yang maju dan masih ada wilayah yang tertinggal. Salah satu wilayah yang tertinggal tersebut adalah Kelurahan Bansir Laut, dimana kurangnya ketersediaan perumahan layak yang memadai, sehingga memunculkan berbagai permasalahan perkotaan, salah satunya adalah terbentuknya kawasan permukiman kumuh.

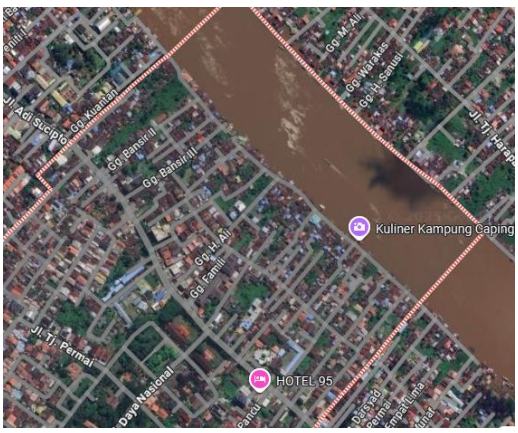
Kawasan kumuh merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Kota Pontianak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh adalah kawasan hunian yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, dan sosial, dicirikan dengan kondisi fisik bangunan yang rusak, kepadatan tinggi, dan minimnya pelayanan prasarana dasar (Yudohusodo, 2015). Permukiman Kumuh merupakan salah satu masalah sosial yang sulit dipecahkan yang kini dihadapi Indonesia. keberadaan permukiman kumuh berkaitan dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat,

keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan (Ardiyan, Izzati, Cardiah, Adriadi, & Ariostar, 2021). Meskipun berbagai inisiatif dan program telah dilaksanakan dalam upaya untuk menghilangkannya, kita masih dihadapkan pada banyaknya permukiman kumuh di hampir setiap bagian kota (Wella, 2023). Keberadaan kawasan kumuh tidak hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat yang mendiami kawasan tersebut.

Tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bansir Laut yang terletak Kota Pontianak, merupakan salah satu kawasan yang menghadapi permasalahan permukiman kumuh. Kelurahan Bansir Laut merupakan salah satu dari empat kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan Luas 2,95 KM^2 (295,53 Ha). Sebagai wilayah yang berada di bantaran Sungai Kapuas, karakteristik geografis Kelurahan Bansir Laut menjadikan kawasan ini rentan terhadap berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir, genangan air, dan sanitasi yang buruk. Kondisi sanitasi permukiman yang buruk meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit berbasis lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat (Hendriarianti, Gai, Supriadi, & Nuswantoro, 2024).



Gambar 1.1 Tepian Sungai Kapuas



Gambar 1.2 Kelurahan Bensir Laut

Pemerintahan wilayah Kelurahan Bansir Laut terdiri dari 09 Rukun Warga (RW) dan 38 Rukun Tetangga (RT). Dari 38 RT yang ada di Kelurahan Bansir Laut, terdapat 5 RT yang termasuk dalam kawasan permukiman kumuh.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kumuh

No.	RT/RW	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah KK	Kepadatan
1	RT.002 – RW.001	1,91 Ha	± 75 KK	± 136 Jiwa/Ha
2	RT.005 – RW.001	2,13 Ha	± 108 KK	± 150 Jiwa/Ha
3	RT.003 – RW.003	1,37 Ha	± 71 KK	± 279 Jiwa/Ha
4	RT.003 – RW.004	1,52 Ha	± 74 KK	± 250 Jiwa/Ha
5	RT.004 – RW.006	3,40 Ha	± 71 KK	± 94 Jiwa/Ha
Total	**5 RT**	**10,33 Ha**	**± 399 KK**	

*Sumber Data: Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 71 Tahun 2023 tentang rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Pontianak

Tabel di atas menyajikan data kawasan kumuh di Kelurahan Bansir Laut yang mencakup lima wilayah RT/RW dengan karakteristik luasan, jumlah kepala keluarga (KK), dan tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi. Secara keseluruhan, luas kawasan kumuh yang teridentifikasi mencapai 10,33 Ha yang tersebar pada 5 RT dengan total jumlah penduduk sebanyak ± 399 KK.

Kondisi hunian yang padat dengan kualitas bangunan yang tidak memadai, terbatasnya akses terhadap air bersih, sistem drainase yang kurang baik, serta minimnya fasilitas sanitasi menjadi ciri khas kawasan kumuh di wilayah ini. Permasalahan ini diperparah dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Agar lebih jelas, permasalahan wilayah kumuh di Tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bansir Laut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Permasalahan Wilayah Kumuh

Aspek	Permasalahan
Bangunan Gedung	20,55% atau sama dengan 82 unit bangunan hunian tidak memiliki ketaraturan
	27,07% atau sama dengan 108 unit bangunan pada lokasi tidak memenuhi peryaratan teknik
Jalan Lingkungan	25,20% atau sama dengan 2.002 meter jalan memiliki kualitas jaringan jalan buruk
Air Minum	60,10% atau sama dengan 250 KK tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimal
Drainase Lingkungan	Seluruh kawasan atau sekitar 471 meter kawasan memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk
Pengelolaan Air Limbah	Ada 7 unit rumah yang sistem pengelolaan air limbahnya tidak sesuai standar teknis yang berlaku
	58,65% atau sama dengan 244 unit rumah memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknk
	Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan
Pengelolaan Sampah	348 unit rumah atau 83,56% memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar

*Sumber Data: Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 71 Tahun 2023 tentang rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Pontianak

Tabel di atas menggambarkan kondisi permasalahan infrastruktur permukiman di Kelurahan Bansir Laut berdasarkan indikator-indikator kekumuhan yang meliputi aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan. Secara umum, data pada tabel ini menunjukkan bahwa permasalahan kekumuhan di kawasan penelitian bersifat multidimensional, tidak hanya terbatas pada satu aspek infrastruktur, melainkan mencakup hampir seluruh indikator fisik dasar permukiman. Kondisi drainase lingkungan dan pengelolaan sampah dapat dikategorikan sebagai permasalahan paling mendesak mengingat cakupannya yang hampir menyeluruh, sementara persoalan pada aspek bangunan gedung dan air minum turut memperkuat gambaran bahwa penanganan kawasan ini memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.

Sepanjang bantaran sungai Kapuas, telah lama berdiri berbagai bangunan mulai dari permukiman padat penduduk, bangunan komersial, gudang, hingga dermaga-dermaga swasta. Banyak di antara bangunan tersebut merupakan rumah panggung di atas tiang yang menjorok langsung ke tepi bahkan ke atas badan sungai, dibangun secara turun-temurun oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada aktivitas sungai.

Gambar 1.3 Kondisi Bangunan



Gambar 1.4 Kondisi Jalan



Keberadaan bangunan-bangunan tersebut secara regulasi bertentangan dengan sejumlah aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur bahwa kawasan sempadan sungai termasuk dalam kategori kawasan lindung yang penggunaannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang, termasuk mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai, dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Gambar 1.5 Kepadatan Bangunan



Gambar 1.6 Kondisi Lingkungan



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kondisi bangunan di Tepian Sungai Kapuas Kelurahan Bansir Laut masih tidak teratur. Dengan kondisi bangunan yangg tidak memiliki keteraturan dan lingkungan yang dipenuhi sampah mengakibatkan kawasan tersebut makin terlihat kumuh. Sehingga diperlukan penanganan yang mendalam mengenai masalah kawasan kumuh tersebut.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013–2033, yang menetapkan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan lindung dan mengatur ketentuan-ketentuan terkait pembatasan penggunaan lahan di kawasan tersebut. Dalam RTRW ini, kawasan tepian Sungai Kapuas termasuk dalam zona yang memerlukan penanganan khusus untuk menjaga fungsi ekologis sungai sekaligus meningkatkan kualitas permukiman di sekitarnya.

Walaupun bangunan di tepian Sungai Kapuas tidak sesuai dan melanggar ketentuan tata ruang, namun penertiban bangunan di sempadan Sungai Kapuas merupakan persoalan yang rumit. Sebagian besar permukiman di tepian Sungai Kapuas telah ada jauh sebelum regulasi tata ruang diberlakukan. Banyak bangunan di sempadan sungai tidak memiliki sertifikat tanah yang sah, namun di sisi lain masyarakat telah menguasai lahan tersebut dalam waktu yang sangat lama sehingga merasa memiliki hak atas tanah tersebut.

Menyadari urgensi permasalahan kawasan permukiman kumuh, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk menangani permasalahan ini. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Di tingkat nasional, pemerintah juga telah meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh di seluruh Indonesia dengan target pencapaian 0% kumuh pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak. Salah satunya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan tujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan fokus pada akses infrastruktur dan pelayanan dasar untuk menciptakan lingkungan yang layak huni. Pemerintahan Kota Pontianak juga mengembangkan kawasan kumuh di bantaran sungai menjadi zona multifungsi, seperti contoh di Parit Nanas yang diusulkan menjadi destinasi wisata air (wisata parit). Namun Pemerintah Kota Pontianak mengalami beberapa hambatan dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, kendala dalam penertiban bangunan, dan adanya kendala dalam implementasi program.

Penataan kawasan permukiman kumuh membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang erat dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Perum Perumnas, dan pemerintah daerah. Kewenangan penanganan kawasan kumuh yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum, kini menjadi tugas dan tanggung

jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui unit-unit pelaksana di daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak merupakan keperpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Pontianak yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan kawasan kumuh. DPRKP Kota Pontianak bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program penataan dan penanganan kawasan kumuh. Peran DPRKP sangat penting karena lembaga ini menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah, mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kawasan kumuh. Dalam menangani kawasan kumuh di Kota Pontianak, DPRKP memiliki program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh.

DPRKP Kota Pontianak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Keterbatasan anggaran, kompleksitas permasalahan status kepemilikan lahan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah menjadi beberapa kendala yang harus dihadapi. Selain itu, permasalahan kumuh yang bersifat multidimensional memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan DPRKP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	BIDANG PERUMAHAN		
	a. Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan: jalan lingkungan, drainasi	1. Kondisi PSU (jalan lingkungan dan drainase) perumahan belum berfungsi dengan baik	1. Pengawasan pembangunan perumahan yang belum optimal 2. Pelaksanaan pembangunan PSU (jalan lingkungan dan drainase) yang tidak sesuai dengan standar teknis 3. Pembangunan PSU (jalan lingkungan dan drainase) yang tidak tuntas karena menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
2	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN		
	a. Rumah Tidak Layak Huni	1. Rumah yang tidak aman dan/atau tidak sehat (misalnya tidak ada jendela, lantai tanah, dinding dan atap bocor) 2. Rumah yang penghuninya terlalu padat. 3. Rumah yang tidak memiliki akses layanan dasar (air bersih , toilet, listrik, dan transportasi)	1. Arus urbanisasi memyebabkan penyediaan rumah tidak sebanding dengan kebutuhan rumah 2. Kurangnya pengawasan untuk mencegah tumbuhnya bangunan liar baru 3. Keterbatasan lahan permukiman dimana pembangunan perumahan masih menyebar /horizontal 4. Standar Teknis pembangunan jalan lingkungan /drainase belum dipatuhi 5. Air bersih dari PDAM belum terdistribusi secara merata 6. Penampungan limbah tinja rumah tangga dengan sistem septic tank tanpa pengolahan 7. Kurangnya kesadaran untuk hidup bersih sehingga masih
	b. Permukiman Kumuh	1. Ketidak teraturan/kepadatan bangunan 2. Jalan lingkungan yang sempit dan rusak 3. Saluran yang rusak/ tersumbat atau tidak terhubung 4. Toilet/ sanitasi belum memenuhi standar teknis 5. Air Bersih belum tersedia 6. Persampahan belum dikelola dengan baik	

		7. Sistem proteksi kebakaran tidak tersedia di tempat	membuang samnpah sembarangan di sungai / tepi jalan
3	BIDANG PERTANAHAN		
	a. Sengketa Pertanahan	1. Timbulnya konflik terhadap tanah untuk infrastruktur/fasilitas umum	1. Kurangnya edukasi peraturan pertanahan/ agrarian 2. Tumpang tindih status kepemilikan

*Sumber: Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

Berdasarkan pemetaan permasalahan di atas dapat diketahui permasalahan yang dihadapi oleh DPRKP Kota Pontianak dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Permasalahan utamanya adalah kualitas yang tidak memenuhi standar teknis dan pembangunan yang tidak tuntas akibat keterbatasan anggaran. Pengawasan yang lemah selama proses pembangunan menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya standar yang telah ditetapkan. Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kesehatan. Distribusi air bersih PDAM yang belum merata, kurangnya pengawasan terhadap bangunan liar, dan rendahnya kesadaran warga akan kebersihan lingkungan juga menjadi permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang strategi, program, kendala, dan efektivitas peran DPRKP dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan implementasi program penanganan kawasan kumuh di masa mendatang guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Pontianak.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pembangunan di wilayah kumuh belum optimal karena keterbatasan anggaran dan lemahnya pengawasan pembangunan
2. Pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat belum diberikan secara merata
3. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian mendalam mengenai upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bensir Laut, Kota Pontianak. Fokus penelitian ini meliputi program penanganan kawasan permukiman kumuh dan jenis program/kegiatan yang telah dilaksasnakan, serta kendala dan hambatan apa yang dihadapi dalam penanganan kawasan kumuh tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak dalam menangani kawasan kumuh di Tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bensir Laut, Kota Pontianak.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dalam menangani kawasan kumuh di Tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bensir Laut, Kota Pontianak. Penelitian ini juga

bertujuan untuk mengidentifikasi strategi serta program-program yang telah dilaksanakan oleh DPRKP dalam menangani permasalahan kawasan permukiman kumuh, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh DPRKP dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh, baik dari aspek teknis, administratif, finansial, maupun sosial.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan dan literatur dalam bidang pembangunan perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh dan peran organisasi perangkat daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan permukiman. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa, serta memperkaya pemahaman mengenai permasalahan kawasan kumuh dan strategi penanganannya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam menilai efektivitas program dan strategi yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

   b. Bagi pemerintah daerah Kota Pontianak

Bagi pemerintah daerah Kota Pontianak, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program penanganan kawasan kumuh yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

c. Bagi masyarakat Kelurahan Bansir Laut

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam program penanganan kawasan kumuh dan mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.